

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

MUHAMMAD RIDHANI

NPM : 2022312

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
ADMINISTRASI PUBLIK**

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama :

Nama : MUHAMMAD RIDHANI
NPM : 2022312
Program Studi : Administarasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus
Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing Skripsi pada Program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1



Dr. Irza Setiawan, S.Sos., M.AP
NUPTK. 9456765666137023

Pembimbing 2



M. Ridha Anshari, S.Sos., M.AP
NUPTK. 15397726731302273

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A

NUPTK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba Dan Desa Banyu Hirang).”** Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data penulis dari berbagai pihak.

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQnR, CIQaR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP. selaku pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak M.Ridha Anshari, S.Sos, M.AP. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
5. Terakhir saya persembahkan kepada ketua orang tua, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Dalam Penulisan Proposal skripsi ini, penulis sudah berupaya maksimal sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, penulis tetap berharap adanya kritik atau saran yang membangun untuk penulis jadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam penulisan berikutnya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai yang diharapkan.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Kebijakan Publik.....	14
2. Proses Kebijakan Publik	17
3. Implementasi Kebijakan.....	18
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.....	28
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Tipe Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber data	40
E. Desain Operasional Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Uji Kredibilitas Data	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan	41
Tabel 1.2 Desain Operasional Penelitian	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yakni sumber daya yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah stunting.

Masalah stunting merupakan salah satu masalah yang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami degeneratif di masa yang akan datang.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Peraturan ini merupakan wujud dari komitmen

pemerintah dalam mempercepat pencapaian target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Implementasi perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dan ini juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengetasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia stunting di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai angka 24,6% sedangkan pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 24,7% dan pada tahun 2024 angka stunting mencapai 22,9%. (*Sumber data dari Kemenkes RI*)

Mengingat hal tersebut tingginya angka stunting saat ini, pemerintah menempuh berbagai kebijakan agar dapat berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting. Secara umum kebijakan mengatasi masalah penurunan stunting harus difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dalam jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dalam jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh yang lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tumbuh pendek, tingkat produktivitas yang

rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Stunting merupakan ancaman dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menuju bonus demografi pada tahun 2045.

Permasalahan stunting saat ini menjadi perhatian khusus yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Masalah gizi seperti stunting harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri, karena masalah ini erat kaitannya dengan kemiskinan, terkait dengan masalah kesehatan pangan di tingkat keluarga, dan melibatkan pengetahuan tentang perilaku hidup sehat.

Pencegahan stunting termasuk ke dalam salah satu yang berfokuskan dalam pembangunan kesehatan dikarenakan pertumbuhan di usia dini adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena salah satu penyebab dari stunting yaitu biasa dilihat dari sumber gizinya atau vitamin. Dengan melihat persentase angka peningkatan stunting, maka saat ini di Indonesia digencarkan di tiap-tiap daerah dengan berdasarkan pengawasan pemerintah salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten dengan kasus stunting yang tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya kasus stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadikan acuan pemerintah untuk lebih memfokuskan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya pembangunan kesehatan. Saat ini Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang menggencarkan program pencegahan stunting di tiap-tiap desa.

Jika diperhatikan, angka stunting yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami penurunan yang signifikan. Padahal pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sudah berusaha dalam mengatasinya. Salah satunya pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui beberapa kebijakan kesehatan.

Beberapa regulasi di daerah juga telah dibuat untuk penanganan stunting dari perda, perbub, surat edaran dan yang terbaru ialah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berbagai regulasi telah dibuat dengan sebaik mungkin agar stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat membaik dan di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Akan tetapi, fakta di lapangan membuktikan jika angka stunting masih tetap tinggi dan tentu hal ini menjadi tanda tanya besar akan penyebab tingginya angka tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Khususnya Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara salah satu kasus angka stunting yang tinggi di antara kecamatan-kecamatan lain. Desa Jumba merupakan salah satu desa dengan angka stunting yang tinggi sebesar 26 anak yang mengalami stunting dengan prevalensi 17,11% di bandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan terutama di Desa Banyu Hirang dengan angka stunting yang rendah. (*Sumber data dari Publikasi Rembuk Stunting tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara*).

Berdasarkan observasi awal penulis di tempat penelitian maka di dapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Desa Jumba

- a. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa perkembangan sebaran prevalensi stunting di Desa Jumba masih tinggi dengan jumlah anak yang stunting sebesar 26 anak dengan prevalensi 17,11% dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Namun masih ada keluarga yang tidak menerapkan tata cara hidup sehat dikarenakan kurangnya sumber daya penyuluh dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama orang tua tentang perilaku hidup bersih dan sehat. *(Sumber data dari Publikasi Rembuk Stunting tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara)*
- b. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (2) huruf a disebutkan bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan akan tetapi informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang terutama kepada anak-anak yang berisiko stunting.
- c. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, namun pemerintah Desa Jumba belum memiliki tempat khusus dalam pelaksanaan posyandu yang masih menggunakan salah satu rumah warga dan

juga belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan rembuk stunting.

- d. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 23 huruf d disebutkan bahwa memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional belum memenuhi target 14% dan belum mengalami penurunan angka stunting yang signifikan hal ini disebabkan karena kurangnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemerintah Desa Jumba kepada Pemerintah Daerah.

2. Desa Banyu Hirang

- a. Pemerintah Desa Banyu Hirang sering melakukan pelaksanaan rembuk stunting memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang mencegah anemia dan memberikan makanan bergizi serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah Daerah sehingga sebaran prevalensi stuntingnya sebesar 0,00% hal tersebut tidak ada anak yang mengalami stunting. (*Sumber data dari Publikasi Rembuk Stunting tahun 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara*).
- b. Kurangnya kesadaran para remaja untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sekali seminggu secara rutin karena dapat menimbulkan efek samping kepala pusing jika dikonsumsi pada siang hari, namun hal tersebut dapat dicegah dengan mengonsumsi pada malam hari.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara(Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang).**”

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap masalah pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian menurut Teori George Edward III dalam Leo Agustino (2020 : 154- 158) maka difokuskan pada:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Reseourches*)
3. Sikap Pelaksana (*Dispositions or attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic struktur*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang) ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)
 - b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)
2. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)
 - b. Penelitian diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang berguna bagi pengembangan pemahaman, dan

pengalaman peneliti khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pejabat-pejabat ataupun elemen lainnya terutama di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hiran.
- b. Meningkatkan Wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hiran.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan sehingga bisa membantu atau menjadi bahan perbandingan tentang kebijakan pemerintah lainnya khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hiran.
- d. Memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Lili Rahmawati. 2022. Yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.” Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi tidak cukupan nutrisi, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Metode penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Secara *Purposive sampling* sebanyak 15 orang. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi, melakukan hasil analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mempengaruhi implementasi Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong belum optimal. *Pertama*, pada sub variabel kondisi lingkungan dalam indikator lingkungan sosial kurang mendukung karena masih rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Berikutnya dalam indikator lingkungan budaya kurang mendukung karena sulitnya mengubah pola asuh dan sanitasi lingkungan. Berikutnya dalam indikator keterlibatan penerima program belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mau terlibat. *Kedua*, pada sub variabel hubungan antar organisasi diketahui dalam indikator koordinasi sudah optimal koordinasi yang dilakukan sudah tepat. Berikutnya dalam indikator kerja sama antar instansi sudah optimal saling mendukung satu sama lain. *Ketiga*, pada sub variabel sumber daya dalam indikator sumber daya manusia sudah optimal bukan hanya dari tenaga kesehatan namun juga dari instansi lainnya. Berikutnya dalam indikator fasilitas belum optimal karena kurangnya fasilitas pendukung. Berikutnya dalam indikator dana sudah optimal sesuai dengan sasaran dan dialokasikan secara baik. *Keempat*, pada sub variabel karakteristik dan kemampuan para agen pelaksana dalam indikator struktur birokrasi sudah optimal sesuai dengan prosuder yang ada. Berikutnya dalam indikator kemampuan sudah optimal sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Berikutnya dalam indikator hubungan kepada kelompok sasaran sudah optimal terjalinnya hubungan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendorong yaitu kegiatan inovasi gizi, rembuk stunting dan penandatanganan kesepakatan

komitmen penanggulangan stunting. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan belum meratanya pembangunan desa terutama dalam pencegahan stunting. Untuk meningkatkan efektifitas implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong untuk melakukan pemantauan dilapangan. Berikutnya, Kepala UPT. Puskesmas Pugaan, untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi. Kepala Desa di Kecamatan Pugaan untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya untuk pencegahan stunting. Terakhir, ibu hamil dan orang tua balita stunting di Kecamatan Pugaan agar mengikuti arahan-arahan yang telah diberikan.

2. Aina Fitriyah. 2024. Yang berjudul “Implementasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sungai Karias dan Tangga Ulin Hulu).” Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Stunting menjadi ancaman cukup serius bagi anak-anak Indonesia salah satu penyebab masalah tumbuh kembang namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting masih mengalami masalah, berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik di Kecamatan Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sungai Karias dan Tangga Ulin Hulu) dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *Sampling* berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dan uji kredibilitas data. Hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Sungai Karias dan Tangga Ulin Hulu terimplementasi kurang baik. dilihat dari sub variabel Komunikasi terdiri dari indikator staf cukup baik, informasi kurang baik, kewenangan dan fasilitas cukup baik. Variabel Sikap pelaksana dilihat dari indikator efek disposisi, tanggung jawab dan empati pelaksana cukup baik, hal tersebut disebabkan para pelaksana lebih memberikan perhatian lebih kepada para anak yang penderita stunting dan memberikan makanan tambahan. Variabel struktur organisasi terdiri dari indikator Membuat Standar Operating Prosuder dan melaksanakan fragmentasi, evaluasi cukup baik, Faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan banyaknya pihak-pihak terkait yang terlihat serta berwewenang terhadap implementasi program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik, staf bekerja sudah sesuai dengan SOPs, sudah ada pembagian tugas kepada

para pelaksana atau terlaksananya fragmentasi dan melakukan evaluasi rutin serta sumber daya manusia yang cukup, fasilitas yang digunakan mencukupi, kader yang lengkap ketika ada kegiatan. Faktor penghambat meliputi masyarakat yang kurang kemudahan dalam mendapatkan informasi, Kurangnya sosialisasi yang didapatkan masyarakat terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik, sosialisasi masih belum konsisten dilaksanakan, belum adanya kejelasan komunikasi. Berdasarkan hasil tersebut disarankan kepada Pemerintah Desa agar dapat memperbaharui fasilitas yang digunakan dalam menjalankan program. Kepada kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) agar lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat berkontribusi serta berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Ada beberapa tahapan siklus kebijakan publik dan salah satu tahap penting siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan

dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan Publik merupakan konsep rencana dari pemerintahan atau organisasi publik untuk mengatur suatu kepentingan umum ataupun khalayak ramai. Apabila kita melihat secara umum, maka pengertian kebijakan publik merupakan segala suatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang mana segala sesuatu itu merupakan setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antar warga ataupun warga dengan pemerintah.

Menurut Eulau & Prewitt dalam Leo Agustino (2020:15) menyatakan bahwa: “kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.”

Menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip dalam Dedy Mulyadi (2016: 36) menyatakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah. Kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.”

Konsep Kebijakan berdasarkan pendapat Dye sangat luas dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada penyempitan aliran sungai yang menyebabkan banjir namun pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah tersebut, berarti pemerintah sudah

mengambil kebijakan. Begitu juga jika pemerintah memilih melakukan sesuatu untuk menangani masalah tersebut dengan memerintahkan instansi terkait agar dapat sesegaranya menangani kasus tersebut untuk mencegah terjadinya banjir kembali, hal ini jelas juga merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Berdasarkan definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu produk yang dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Menurut David Easton dalam Sahya Anggara (2016: 35), mengatakan “*Public policies is the authoritative of values for the wholw society* (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).”

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2017: 67), mengatakan bahwa “implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.”

Menurut Hinggis dalam Harbani Pasalog (2017:67) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Seringkali orang beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, nyatanya sebaik apapun rencana yang

telah dibuat jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka rencana tersebut tidak ada gunanya.

Rencana akan berjalan dengan baik dan benar jika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kejujuran, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, serta dengan memperhatikan rambu-rambu atau aturan pemerintah yang berlaku. Namun sayangnya implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai tertentu.

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Tahap-tahap proses implementasi yaitu :

- a. Output-output kebijakan-kebijakan dari badan-badan pelaksana.
- b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
- d. Persepsi atau pandangan terhadap dampak keputusan- keputusan tersebut.
- e. Evaluasi system politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/isinya.

Dikutip dalam AG. Subarsono (2021: 8), menyatakan bahwa :

“Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.”

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosuder, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang telah di susun secara terperinci. Biasanya implementasi ini dilaksanakan setelah melakukan perencanaan yang di anggap sudah tepat.

Joko Widodo dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 154 menyatakan bahwa:

“Implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber daya yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.”

Menurut Ghazali H. Situmorang (2016: 173) Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Leo Agustino (2019: 126) Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk

tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan hasil dari suatu kebijakan (segala peraturan pemerintah pusat dan daerah, menteri ataupun dalam bentuk program dan undang-undang) yang telah dirancang sedemikian rupa yang memiliki tujuan sehingga dalam penerapan sudah dirancang alat apa saja yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai maupun berakhirnya pelaksanaan yang harus dilakukan.

b. Aktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dari implementasi kebijakan, tidak luput dari peran aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Budi Winarno (2016: 116- 132) ada lima implementor dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu :

1) Badan-badan Administrasi (Agen-agen Pemerintah)

Di Amerika, Pada umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh sistem badan administrasi yang kompleks. Badan administrasi ini melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari dapat mempengaruhi masyarakat tindakan-tindakannya.

2) Lembaga Legislatif

Saat ini, lembaga legislatif selain sebagai pembuat undang-undang, lembaga ini juga turut dalam implementasi tersebut.

3) Lembaga Peradilan

Keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata kelola atau administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan administrasi dan regulasi, pengajian ulang terhadap keputusan administrasi dalam kasus yang dibawa ke pengadilan.

4) Kelompok-kelompok Penekan

Kelompok Penekan ini berusaha untuk mempengaruhi peraturan untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka. Dari kelompok penekan pulalah, biasanya, pemerintah menggali keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan warga.

5) Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat ini menjadi aktor dalam implementasi kebijakan, karena mereka terlibat dalam pelaksanaan program-program untuk publik.

c. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melihat instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas tahap, yaitu tahap pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor pendukung atau bahkan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Proses implementasi kebijakan publik berkaitan dengan 2 faktor utama yaitu:

- 1) Faktor internal, yaitu kondisi lingkungan, sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi dan partisipasi.

2) Faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang terkait. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Kondisi fisik
- b) Faktor politik
- c) Tabiat, yaitu perilaku seseorang yang tidak sabar menunggu berlangsungnya implementasi kebijakan
- d) Terjadinya penundaan karena keterlambatan
- e) Kelemahan salah satu langkah dalam tahap implementasi kebijakan tersebut.

e. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi didalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang sering diterapkan. Pada umumnya, model-model implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Dikutip dalam Leo Agustino (2020: 154-158) Edward III mengemukakan ada empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni Komunikasi, Sumber daya, Sikap pelaksana dan Struktur Birokrasi

1) Komunikasi (*Communication*)

Edward III menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami deksripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu:

- a) Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi (untuk diterapkan dan dijalankan)

2) Sumber Daya (*Resourches*)

Sehubungan dengan faktor sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM)
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, jika suatu fasilitas terbatas atau bahkan kurang maka hal tersebut dapat menghambat suatu implementasi kebijakan.

3) Sikap Pelaksana (*Dispositions or attitudes*)

Edward III menjelaskan Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-

kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan bagi mereka maupun bagi organisasi mereka.

Hal-hal penting dan perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III, adalah:

- a) Efek disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pengaturan birokrasi; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulatif insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka

sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi para pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III menjelaskan meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan telah mencukupi dan para implementor itu sendiri telah mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, namun terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting terlupakan.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkarak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Procedure (SOPs) yang telah fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk

melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- b) Melaksanakan fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan hidangnya masing-masing.

Masih dalam Leo Agustino (2020: 169-170) Charles O. Jones mengatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Aplikasi (Penerapan).”

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan sesuai tujuan.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Sebagai salah bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam

mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Perpres ini juga memperkuat penerapan strategi nasional percepatan penurunan stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Implementasi Perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting. Saat ini, Indonesia telah memiliki 148 anggota *SUN Networks* yang terdiri dari atas 25 kementerian atau lembaga, 11 mitra pembangunan, 40 dunia usaha dan asosiasi, 34 organisasi masyarakat madani, 23 perguruan tinggi serta 15 organisasi profesi, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *focal point*. Percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan sinkronisasi di antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan.

Secara detail, Perpres 72 Tahun 2021 terdiri atas tiga bagian. Pertama, batang tubuh yang terdiri dari bab 8 dan 31 pasal. Kedua, Lampiran A yang menguraikan 20 Target antara. ketiga, lampiran B yang terdiri atas rincian 71 keluaran (*output*) Pilar Strategis Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Selain memuat arahan Presiden, Perpres ini merupakan wujud kesepakatan antar kementerian atau lembaga,

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. Dengan terbitnya perpres ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan pemerintah untuk perbaikan gizi di Indonesia. Percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Pada 2030 mendatang.

a. Pengertian Stunting

Stunting merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu pengerdilan dimana keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek hingga melebihi keadaan seharusnya dibawah median panjang atau tinggi badan. Menurut World Health Organization (WHO), stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting dapat di diagnosis melalui indeks antropometri tinggi badan yang mencerminkan pertumbuhan linear yang di capai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai. Stunting merupakan pertumbuhan linear yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit infeksi.

Stunting merupakan masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ada bukti jelas bahwa individu yang stunting memiliki tingkat kematian yang

lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. Stunting akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu.

Anak bertubuh pendek juga bisa disebabkan karena *Short Stature*, dimana panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin berada dibawah rata-tara teman seusianya. Sedangkan anak yang bertubuh pendek karena stunting mengalami gagal tumbuh akibat kondisi kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal. Anak pendek normal ada yang patologis, yang patologis ini dilihat lagi, apakah patologis profesional atau tidak. Kalau tidak profesional biasanya karena kelainan genetik contohnya cebol. Jika profesional itu salah satunya adalah stunting

b. Ciri-ciri Stunting Pada Anak

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO.

Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak, tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran.

Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya yaitu pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang disekitarnya berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat *menarche* (menstruasi pertama anak perempuan), anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

c. Penyebab-penyebab stunting

Penyebab stunting sangatlah beragam baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi pada ibu dan anak. Kualitas sumber daya manusia seseorang ditentukan asupan gizi saat dalam kandungan dan masa usia balita. Orangtua perlu memberikan makanan yang tepat bagi anak, terutama pada 1.000 HPK, atau sejak anak dalam kandungan (9 bulan) sampai ia berusia 2 tahun yang sering disebut juga sebagai periode emas.

Selain itu ada penyebab tidak langsung mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan sosial (Pemberian makanan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses air bersih, air minum, dan sarana sanitasi). Keempat faktor tidak langsung tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap

keempat faktor penyebab tidak langsung tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi.

Penyebab langsung dan tidak langsung tersebut diatas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

d. Dampak Masalah Stunting Pada Anak

Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Maka itu, kondisi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme.

Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak pada menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit, risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, kesulitan belajar.

Bahkan, ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang

mengalami stunting, ia berisiko mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 145 cm karena mengalami stunting sejak kecil.

Ibu hamil yang bertubuh pendek di bawah rata-rata akan mengalami perlambatan aliran darah ke janin serta pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin, kondisi tersebut berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan tinggi badan yang di bawah rata-rata berisiko mengalami komplikasi medis yang serius, bahkan pertumbuhan yang terhambat.

Perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi tersebut bisa terhambat disertai dengan tinggi badan anak tidak sesuai usia. Selayaknya stunting berlangsung sejak kecil, bayi dengan kondisi tersebut juga akan terus mengalami hal yang sama sampai ia beranjak dewasa.

e. Cara Mencegah dan Menangani Stunting

Mencegah stunting berarti memastikan asupan gizi yang baik (atau istilah bakunya, bergizi seimbang) sejak masa remaja (Putri). Bukan hanya asupan gizi namun juga perilaku sehat sudah dipraktikkan sejak remaja untuk mencegah gizi terbuang percuma atau tidak terserap optimal. Ada 4 masa yang perlu diperhatikan yaitu masa remaja putri, masa ibu hamil sampai bersalin, masa ibu menyusui, dan masa bayi usia 6-24 bulan dan disepanjang empat masa tersebut semua harus makan-makan bergizi seimbang,

berperilaku sehat dan mencegah terkena penyakit yang bisa mengganggu penyerapan zat gizi. Selain itu terdapat perilaku spesifik yang perlu diterapkan yaitu pada masa remaja putri diharuskan untuk minum Tablet Tambah Darah (TTD). Pada masa ibu hamil dan bersalin diharuskan minum Tablet Tambah Darah (TTD) atau makan Ati, Telor, Ikan (ATI-KA), melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan, serta mencegah terkena malaria. Pada masa ibu menyusui diharuskan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), memberikan asi eksklusif selama 6 bulan dan mengunjungi posyandu secara rutin. Pada bayi usia 6-24 bulan diharuskan memberikan ASI sampai 2 tahun dan memberikan makanan pendukung (MP) ASI.

Menangani stunting adalah usaha jangka panjang, karena ini berbeda dengan gizi buruk (tubuh sangat kurus, ada pembengkakan atau edema di punggung tangan dan kaki), sedangkan untuk menangani stunting harus belajar mengubah perilaku orang tua. Pola makan harus lebih baik atau yang bergizi seimbang. Kebersihan dijaga, perilaku sehat harus dibentuk, kunjungi posyandu secara rutin dan mendapatkan vitamin A, imunisasi harus diterima secara lengkap, dan perubahan itu tidak boleh hanya berlangsung sesaat.

Mewaspadaai masa 1000 HPK merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Masa inilah proses pertumbuhan anak dimulai. Keluarga merupakan unit utama dalam menentukan masa depan anak, untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang berkualitas sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan

anak. Periode 1000 hari itu, yaitu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi, merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Agar 1000 HPK dapat dilalui dengan baik, sangat penting memperhatikan asupan nutrisi dan gizi yang tepat bagi ibu hamil dan anak. Selain itu, yang juga tidak kalah penting yaitu keluarga perlu mempersiapkan pola pengasuhan yang baik untuk anak. Tidak terpenuhinya asupan nutrisi dan gizi serta kesalahan dalam pengasuhan pada masa 1000 HPK seorang anak akan berdampak sangat buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari.

C. Kerangka Pemikiran

Stunting adalah masalah gizi kronis yang ditandai dengan tubuh yang pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. Kemiskinan dan kekurangan persediaan pangan yang bergizi merupakan faktor penting dalam masalah stunting, penyebab lain dari stunting adalah salahnya pola pikir serta pola asuh yang telah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan tenaga kesehatan kepada masyarakat pentingnya mencegah stunting sejak dini.

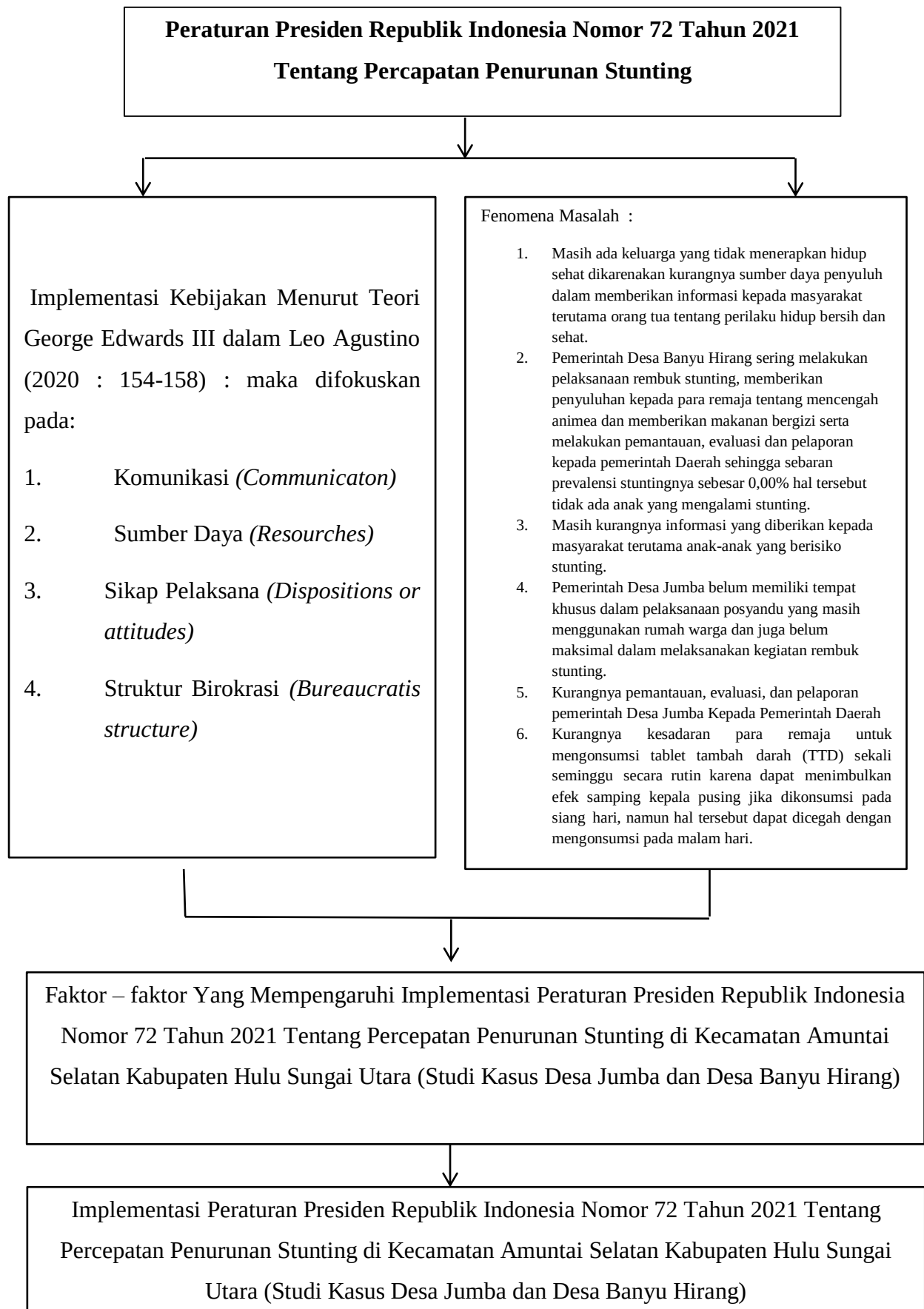
Berikut ini dikemukakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memahami fenomena Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di

Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang. Adapun teori yang diuraikan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi yaitu menggunakan Teori George Edward III dalam Leo Agustino (2020: 154-158); maka difokuskan pada:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resourches*)
3. Sikap Pelaksana (*Dispositions or attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kecamatan Amuntai Selatan dengan Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, artinya data yang diperoleh akan disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan jalan menelaah atau mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian yang peneliti tetapkan.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan maksud deskriptif atau memaparkan suatu objek masalah ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai fenomena Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan

Penurunan Stunting di Kecamatan Amuntai Selatan. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh sesuai tujuan penelitian yang hendak dicapai, tipe tujuan deskriptif kualitatif juga bisa diartikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis dan cerdas serta faktual terhadap permasalahan masa kini.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung melalui observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data dapat berupa orang, buku, dokumen dan sebagainya.

2. Sumber data

Penelitian ini penentuan informan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu dengan cara pengambilan subjek bukan hanya didasarkan atas strata, random dan daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Menurut Sugiyono (2016: 85) mengemukakan bahwa teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik dengan pertimbangan tertentu. Dengan

demikian teknik pengambilan informan pada penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terkait yang terdiri 15 orang informan di antaranya :

Tabel 1.1

Informan

No	Nama	Jumlah
1	Pegawai Puskesmas Amuntai Selatan	1 Orang
2	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hulu Sungai Utara	2 Orang
3	Kepala Desa Jumba	1 Orang
4	Aparat Desa Jumba	2 Orang
5	Masyarakat Desa Jumba	3 Orang
6	Kepala Desa Banyu Hiran	1 Orang
7	Aparat Desa Banyu Hiran	2 Orang
8	Masyarakat Desa Banyu Hiran	3 Orang
Jumlah		15 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Selain penelitian itu sendiri operasional penelitian dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Data lisan adalah data hasil dari wawancara dengan yang bersangkutan, data tulisan adalah data yang telah diberikan oleh bersangkutan berupa tulisan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti memerlukan alat bantu berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan atau

mengungkapkan gambaran lapangan dan hasilnya akan diolah/ dianalisa sedemikian mungkin untuk mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Beberapa konsep yang erat kaitannya dengan topik yang perlu di operasionalkan adalah:

Tabel 1.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Model Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Leo Agustino (2020: 154-158)	Komunikasi (<i>Communication</i>)	a. Sosialisasi b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumber Daya (<i>Resourches</i>)	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	Sikap Pelaksana (<i>Dispositions or Attitudes</i>)	a. Efek Disposisi b. Melakukan Pengaturan Birokrasi c. Insentif
	Struktur Birokrasi (<i>Bureauratic Structure</i>)	a. Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel b. Melaksanakan Fragmentasi c. Evaluasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mc Millan dan Scumacher dalam buku Uhar Suharsaputra (2018:209) mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain Observasi partisipasi; Observasi bidang/lapangan; Wawancara mendalam; Dokumen dan artefak dan teknik tambahan seperti bentuk audio visual.

Untuk pengumpulan data di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek permasalahan, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu melakukan proses tanya jawab dengan responden penelitian secara langsung untuk memperoleh data. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang menggunakan catatan-catatan yang ada dalam lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah

G. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew B. Miles, A. Michael huberman dan Johny Saldana dalam buku mereka yang berjudul *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* yaitu:

1. Kondensasi Data

Pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhaan, pengabstrakisan, dan/atau transformasi data yang muncul dalam korpus (tubuh) lengkap dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan memadatkan, kami membuat data lebih kuat.

2. Tampilan Data

Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompres yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, tampilan bervariasi dari pengukur bensin hingga koran hingga pembaruan status facebook. Melihat tampilan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu baik menganalisis lebih lanjut mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu.

3. Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, analisis, kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsi. Peneliti yang kompeten memegang kesimpulan ini dengan ringan, mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulannya masih ada, apa awalnya tidak jelas, kemudian semakin

eksplisit dan membumi. Kesimpulan “Final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai.

H. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data adalah pengajian data yang menilai hasil penelitian akan di tunjukkan jika partisipan masyarakat bahwa transkrip penilaian memang benar-benar sebagai pengalaman dari diri sendiri

Menurut Sugiyono (2023: 185 - 193), untuk menguji keabsahan hasil penelitian kualitatif digunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain, melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*.

1. Perpanjangan pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.
2. Meningkatkan ketekunan, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.
3. Melakukan triangulasi, artinya pengecekan data dari berbagai narasumber, dari berbagai cara atau alat pengumpul data, dari berbagai tempat, dari berbagai situasi sosial, dan sebagainya.
4. Analisis Kasus Negatif, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
5. Menggunakan bahan referensi, artinya melengkapi data yang bersifat deskriptif dan naratif itu dengan foto-foto, gambar-gambar, rekaman suara, gambar hidup, dan sebagainya untuk menguatkan pernyataan-pernyataan yang diberikan
6. Membercheck ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Tim Penyusun, 2022. *Buku Pedoman Skripsi 2022*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Agustino, Leo . 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabate, cv.
- Anggara, Sahya . 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pustaka Setia.
- Dewi, Rahayu Kusuma.2016. *Study Analisis Kebijakan* . Bandung: CV PUSTAKA Setia, Cetakan Ke-1
- Mulyadi, Deddy.2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta
- Miles, Matthe B.A. Michel Hurbeman and Johny Saldana.2016. *Qualitative Data Analysis A Methods soercebook*. California : SAGE Publivations
- Pasolong, Harbani.2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabate.cv.
- Subarsono, AG.2021. *Analisis Kebijakan Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono,2016. *Metode Penelitian Kuanitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-30
- Sugiyono,2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-6
- Situmorang, Ghazali H.2016. *Kebijakan Publik, Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: CV. Khalifah Mediatama
- Suharsaputra,Uhar.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Winarno, Budi.2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS
- Sumber Internet :
- Anonim.2022. *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia :
<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4855/3/Buku%20Saku%20SSGI%202022%20rev%20270123%20OK.pdf> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025

Anonim.2023. *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Tersedia :
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025

Anonim.2023. *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Tersedia :
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025

Sumber dari Skripsi :

Rahmawati, Lili.2022. *Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong*. Skripsi Pada STIA Amuntai : diterbitkan

Fitriyah, Aina.2024. *Implementasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui intervensi Gizi Spesifik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Sungai Karias dan Desa Tangga Ulin Hulu)*. Pada STIA Amuntai : diterbitkan